



**BerAKHLAK** # bangga melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
-harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA 2024



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN PELAIHARI 2025

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 telah diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari untuk masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Pelaihari, Januari 2025

**CAMAT PELAIHARI,**



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**

**Pembina Tk.I / (IV/b)**

**NIP. 19850808 200412 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	1
C. Dasar Hukum .....	1
D. Cascading Kinerja .....	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis .....	18
G. Dukungan Sdm, Sarana Prasarana Dan Anggaran .....	20
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya .....	22
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>25</b>
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten .....	25
B. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	31
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>34</b>
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	34
B. Akuntabilitas Keuangan .....	81
<b>Bab IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	83
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. IKU	
2. PERNYATAAN HASIL REVIU	
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2024	
4. POHON KINERJA	
5. HASIL EVALUASI RENJA	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	16
Tabel 2.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	16
Tabel 3.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	17
Tabel 4.	Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	17
Tabel 5.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari .....	19
Tabel 6.	Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	20
Tabel 7.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .....	23
Tabel 8.	Tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Laut.....	26
Tabel 9.	Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari .....	27
Tabel 10.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari.....	28
Tabel 11.	Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	29
Tabel 12.	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	31
Tabel 13.	Pengelompokan Capaian Kinerja.....	35
Tabel 14.	Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	35
Tabel 15.	Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	36
Tabel 16.	Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024 (Berkembang-Maju) .....	37
Tabel 17.	Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024 (Maju-Mandiri).....	37
Tabel 18.	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	38
Tabel 19.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	39
Tabel 20.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024.....	39
Tabel 21.	Desa Mandiri di Kecamatan Pelaihari tahun 2024 .....	40
Tabel 22.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	43
Tabel 23.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	43
Tabel 24.	Sasaran Strategis, Indikator, Target Sekretariat Kecamatan Pelaihari .....	44
Tabel 25.	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Kesektarian 7 Unsur Pelayanan Kesektarian Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	45

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 berdasarkan Komponen penilaian .....	46
Tabel 27. Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat .....	46
Tabel 28. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	47
Tabel 29. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Bagian Sekretariat Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	47
Tabel 30. Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2024-2026.....	48
Tabel 31. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	50
Tabel 32. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	51
Tabel 33. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2024 .....	52
Tabel 34. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	55
Tabel 35. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi PMDK Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	56
Tabel 36. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2024.....	58
Tabel 37. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	61
Tabel 38. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	61
Tabel 39. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2024 .....	62
Tabel 40. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	64
Tabel 41. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	64
Tabel 42. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2024 .....	65
Tabel 43. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	67
Tabel 44. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	69
Tabel 45. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	69
Tabel 46. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2024.....	70
Tabel 47. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	72
Tabel 48. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	73

Tabel 49. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2024 .....	73
Tabel 50. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	75
Tabel 51. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	75
Tabel 52. Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	77
Tabel 53 . Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.....	79
Tabel 54. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 .....	81
Tabel 55. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Pelaihari .....	81
Tabel 56. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2024.....	82
Tabel 57. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari .....	4
Gambar 2. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa .....	49
Gambar 3. Fasilitasi Pemasaran Produk BUMDes di Stand Kecamatan Pelaihari Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 59 .....	53
Gambar 4. Pelaksanaan Musrenbang Desa Kecamatan Pelaihari di Kecamatan Bajuin ..	54
Gambar 5. Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari .....	54
Gambar 6. Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 di Kecamatan Jorong .....	59
Gambar 7. Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Ambungan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	59
Gambar 8. Aplikasi BUDI TANRI .....	66
Gambar 9. Forum Konsultasi Publik tahun 2024 .....	68

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2023.....	41
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari sebagai wujud dari pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini adalah :

- a. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2024;
- b. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah :

- a. Untuk pengambilan Keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk efisinsi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggaran;
- b. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari di masa yang akan datang.

### **C. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 didasari atas :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

#### **D. CASCADING KINERJA**

Cascading Kinerja Kecamatan Pelaihari tahun 2024 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, sasaran dan Indikator Esselon III sampai dengan Esselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Pelaihari memiliki 2 (dua) Tujuan Strategis dengan 2 (dua) Indikator Tujuan
2. Kecamatan Pelaihari memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Eselon III (Camat) dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Eselon III (Camat).
3. Kecamatan Pelaihari memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis Eselon III (Sekretaris Camat) dengan 5 (lima) Indikator Sasaran Eselon III (Sekretaris Camat).
4. Kecamatan Pelaihari memiliki 20 (dua puluh) Sasaran Strategis Eselon IV dengan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran Eselon IV.

#### **E. PROSES BISNIS, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kecamatan Pelaihari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok jabatan fungsional
- 9) Kelurahan



Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Pelaihari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan Pelaihari dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Pelaihari dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

**1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## 2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- n. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- o. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, surat jalan dan surat keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- l. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
  - 1) Penanggulangan bencana.
  - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.

- 3) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
  - 4) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
  - 5) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
  - n. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
  - o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
  - p. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
  - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
  - s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;

- f. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **5. Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan social terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **6. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **7. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Pelaihari sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggung jawab kepada Camat Pelaihari.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Pelaihari didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari 16 (delapan belas) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Nama Jabatan	Eselon	Status			Jumlah
			PNS	Non PNS	Non PNS	
1.	Camat	III.a	1			1
2.	Sekretaris	III.b	1			1
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2		5	8
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2		1	3
4.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0			0
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1			1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	IV.a	0			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1			1
7.	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1			1
8.	Kasi Pelayanan	IV.a	1			1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		2	3
9	PPPK	VII		1		
<b>JUMLAH</b>			<b>16</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor Kecamatan Pelaihari untuk golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 12 (dua belas) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang dan PPPK 1 (satu) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	2
5.	Pembina	IV/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>
6.	Penata Tk.I	III/d	4
7.	Penata	III/c	2
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	4
9.	Penata Muda	III/a	2
		<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>
10.	Pengatur Tk.I	II/d	1
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
16.	Juru Muda	I/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>
17.	PPPK	VIII	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>17</b>

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Pelaihari untuk Jenjang SLTA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang, Jenjang D3 sebanyak 4 (empat) orang, jenjang S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	3	3	6
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	4	1	5
7.	D.4	-	-	-
8.	Sarjana (S-1)	8	4	12
9.	Pasca sarjana/Master (S-2)	2	-	2
-	Doktor (S-3)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Pelaihari didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	2	2		
2.	Mini bus	2	2		
3.	Sepeda motor	5	5		
4..	Lemari besi	10	7	3	
5.	Rak besi	3	3		
6.	Filing cabinet besi	8	8		
7.	Lemari Kayu	3	3		
8.	Rak Kayu	2	2		
9.	CCTV	2	2		
10.	Papan visual / papan nama	1	1		
11.	Papan pengumuman	1	1		
12.	Meja kerja kayu	20	18	12	
13.	Meja rapat	20	20		
14.	Kursi tamu	3	3		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
15.	Kursi biasa	14	14		
16.	Bangku tunggu	4	2	2	
17.	Sofa	4	4		
18.	Mesin pemotong rumput	1		1	
19.	Lemari es	2	2		
20.	AC split	12	9	3	
21.	Kipas angin	6	7		
22.	Televisi	1	1		
23.	Loudspeaker	2	1		
24.	Sound system	2	1		
25.	Stabilisator	1	1		
26.	Camera video	1	1		
27.	Handy cam	1	1		
28.	Karpet	4	4		
29.	Tangga	1	1		
30.	Audio mixing stationer	1	1		
31.	Audio monitor active	1	1		
32.	Audio visual	1	1		
33.	Microphone/wireless MIC	1	1		
34.	Power amplifier	3	1		
35.	Layar film/proyektor	3	2	1	
36.	Alat studio pemetaan lainnya	2	2		
37.	Genset	1	1		
38.	Uninterrupted power supply (UPS)	1	1		
39.	PC unit	7	6	2	
40.	Lap top	9	7	2	
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	13		3
42.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		

## F. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

### 1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

### 2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;

- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

### 3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- c) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- d) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- e) Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
1.	Ketentraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum memadai	
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip		
2.	Pemberdayaan dan penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna Posyandu) di desa	
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa		
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk Musrenbang Kabupaten		
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani	
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu		
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	
		Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang cepat waktu dan sesuai standar pelaporan	
		Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Jumlah personil di Kecamatan Pelaihari masih kurang	Belum terisinya semua jabatan fungsional umum sesuai standar SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, tersedia hanya 18 orang
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparaturnya pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pelaihari masih kurang memadai peralatan penunjang gedung kantor	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. :

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## G. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya pencapaian kinerja organisasi, Kecamatan Pelaihari didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
1.	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Tersusun dengan Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.980.250	3.500.000	87,93%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.604.950	1.500.000	93,46%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
2.	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Bersih dan Optimal		Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.773.949.859	9.042.280.662	92,51%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.090.524	1.019.200	93,46%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
3	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang optimal		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.866.450	15.120.000	89,65%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
4	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.222.478	5.575.832	89,61%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.533.002	109.672.409	90,24%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.695.456	7.105.012	81,71%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.916.448	11.684.500	83,96%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	15.000.000	100%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.750.000	283.717.739	99,99%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.121.948	9.900.000	89,01%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	29.209.321	25.500.000	87,30%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	53.500.000	49.582.319	92,68%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984	205.642.800	99,33%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.911.493	99,70%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	40.000.000	39.529.525	98,82%	5 Orang	Sub Bag Umum & Perlengkapan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000	6.430.000	92,52%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
6	Tertindakannya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.334.426	6.836.000	93,20%	2 Orang	Seksi Pelayanan
7	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Program Koordinasi Ketertiban dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.022.338	24.711.000	91,45%	2 Orang	Seksi Ketertiban & Ketertiban
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	37.944.669	36.753.860	96,86%	2 Orang	Seksi Ketertiban & Ketertiban
8	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	964.377.805	943.401.428	97,82%	2 Orang	Seksi Kemasyarakatan
9	Meningkatnya Layanan Terhadap Perekonomian Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.563.404	29.266.792	99,00%	1 Orang	Seksi PMD/K
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	9.577.568	9.390.000	98,04%	1 Orang	Seksi PMD/K
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.556.384	1.540.000	98,95%	1 Orang	Seksi PMD/K
10	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.231.126	7.913.273	96,14%	1 Orang	Seksi Tata Pemerintahan

## H. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700.1.2.1/72/LHE-AKIP-IrbanIII/Insp/2024, tanggal 1 April 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, Kecamatan Pelaihari memperoleh Nilai 77,1 dengan Predikat **“Baik (B)”** .

Dari Rekomendasi tersebut ada 4 (empat) komponen yang disampaikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
PERENCANAAN KINERJA	Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Penyusunan perencanaan kinerja telah mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan
	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan untuk meningkatkan Kinerja serta feedback pimpinan
	Agar dokumen perencanaan disesuaikan dengan sistematika penyusunan	Sistematika penyusunan telah disesuaikan
PENGUKURAN KINERJA	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)	penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran telah dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)
	Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan dan Laporannya sebagai pertimbangan Perubahan Target Renja
PELAPORAN KINERJA	Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Per Triwulan
	Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Laporan kinerja yang disusun dapat digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
	Laporan Kinerja yang disusun agar menyajikan analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya	Laporan Kinerja yang disusun sudah menyajikan analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut	Membuat Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2023 dan Menguploadnya di Sakuntala

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari, menggambarkan maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Pelaihari.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Pelaihari yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan instrument pendukung capaian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan

#### BAB IV PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. TUJUAN, SASARAN KABUPATEN**

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Aspek Pembangunan Manusia adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Kabupaten Tanah Laut. Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Sedangkan aspek pembangunan Tata Kelola Pemerintahan adalah aspek yang fokus kepada kualitas tata kelola pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi hak-hak masyarakat dan menjamin akses serta kolaborasi pembangunan yang inklusif. Ketiga aspek ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing”. Makna dari “Berdaya saing” mengandung arti suatu kemampuan dan kemampuan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif, dan pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing aspek kemudian dielaborasi menjadi tujuan dengan sasaran turunannya. Adapun masing-masing sasaran diformulasikan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang memiliki keterkaitan antar bidang urusan (*cross cutting issue*).

Tabel 8. Tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Laut

NO	TUJUAN	SASARAN	
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Meningkatnya Layanan Pendidikan yang Berkualitas
		2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan yang Berorientasi Kesenjangan Gender
		4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
		5	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan
		6	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga
2	Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan
		2	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Industri Olahan
		3	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
		4	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	TUJUAN	SASARAN	
		5	Menurunnya Pengangguran
		6	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin
		7	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa
		8	Meningkatnya Nilai Investasi
		9	Meningkatnya Kemandirian Pangan
		10	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas
		11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		12	Menurunnya Resiko Bencana
3	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Birokrasi Berkualitas
		3	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		4	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah
		5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah
		6	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit

## B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah maka Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 karena tidak tersedianya visi misi Kepala Daerah. Konsep RPD diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan RPD Kabupaten Tanah Laut, yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, maka ditetapkan tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PER TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	0,6	0,63	0,65
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,5	88	88,05

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PER TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Pelaihari	Kinerja Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai	82	83	83

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholder yang menunjukkan peran utama Kecamatan Pelaihari mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Pelaihari handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Pelaihari menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Pelaihari menentukan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Perkembangan Desa Mandiri dan Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Perkembangan Desa dan tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil/tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa Yang Ada}}$	Kasi PMD/K, Kasi Kemasyarakatan, Kasi Trantib dan Kasi Tapem

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	Semua Kasi

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Camat, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Camat :</b>				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan	0,6	4 program/ 4 Kegiatan/ 7 Sub Kegiatan	Rp 1.078.273.294
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	87,5 (BB)	1 Program/ 1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	Rp 7.334.426
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kecamatan Pelaihari	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	82	1 Program / 7 Kegiatan/ 18 Sub Kegiatan	Rp 10.624.412.670
<b>Sekcam :</b>				
Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai Komponen Perencanaan	24	1 Program / 7 Kegiatan/ 18 Sub Kegiatan	Rp 10.624.412.670
	Nilai Komponen Pengukuran	24		
	Nilai Komponen Pelaporan	12		
	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20		
	Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	87		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b>				
Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 16.866.450
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 7 Sub Kegiatan	Rp 460.239.332
Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Capaian Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 260.521.984
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp 29.209.321
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 3 Sub Kegiatan	Rp 76.950.000
<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :</b>				
Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	1 program / 1 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp 5.585.200
Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Bersih dan Optimal	Persentase Capaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1 program / 1 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp 9.775.040.383
<b>Kasi Tata Pemerintahan :</b>				
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	1 program / 1 kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 8.231.126
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 program / 1 kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 8.231.126
<b>Kasi PMD/K :</b>				
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
Meningkatnya Layanan Terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasinalnya Berjalan Baik	100%	2 Program / 2 Kegiatan / 3 Sub Kegiatan	Rp 40.697.756
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	1 Program / 1 Kegiatan / 1Sub Kegiatan	Rp 29.563.404
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Program / 1 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp 11.133.952
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		
<b>Kasi Kemasyarakatan :</b>				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 964.377.805
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	2 Jenis	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 964.377.805
<b>Kasi Trantib :</b>				
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
Meningkatnya Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah gangguan Kamtibmas yang tertangani	2 Laporan	2 Pogram / 2 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp 64.967.007
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 27.022.338
Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 37.944.669
<b>Kasi Pelayanan :</b>				
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 7.334.426
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Program / 1 Kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp 7.334.426

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2024 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024 itulah yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.

#### D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran Rp. 11.710.020.390,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
1.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Perencanaan Daerah Dokumen Perangkat	Rp3,980,250

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
	Kinerja Kecamatan Pelaihari	Daerah Kabupaten/Kota		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp1,604,950
			Administrasi Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9,773,949,859
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp1,090,524
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp16,866,450
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6,222,478
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp121,533,002
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp8,695,456
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp13,916,448
				Penyediaan Bahan/Material	Rp15,000,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp283,750,000
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp11,121,948
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp29,209,321
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp53,500,000
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp207,021,984
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp30,000,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Rp40,000,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6,950,000
			2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Rp29,563,404
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Rp27,022,338

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp964,377,805
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	Rp37,944,669
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Rp9,577,568
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp1,556,384
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp8,231,126

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja pertama RPD 2024-2026 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan pada pohon kinerja hasil desk dengan KemenpanRB.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 13. Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II.	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III.	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV.	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V.	Kurang dari sama dengan 50 %	Sangat Rendah

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kantor Pelaihari 2024 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,60	0,60	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	95,59	109,24%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu Pengukuran terhadap perkembangan dan kemandirian desa yang ada di kecamatan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.

1. Kecamatan Pelaihari memiliki 15 Desa, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, Indeks Desa Membangun sampai dengan tahun 2024 terdapat 9 Desa Mandiri, 4 Desa Maju dan 2 Desa Berkembang. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur status perkembangan desa di Indonesia. IDM digunakan untuk: mengetahui tingkat perkembangan dan kemandirian desa, menyusun rekomendasi kebijakan, sebagai dasar untuk mengalokasikan dana desa, sebagai acuan perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan IDM, desa di kualifikasikan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan nilai Indeks yang diperoleh dari tiga komponen utama : Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan. Klasifikasi ini meliputi :
  - a. Desa Sangat Tertinggal : Nilai IDM < 0,491
  - b. Desa Tertinggal : Nilai IDM >0,491 dan < 0599
  - c. Desa Berkembang : Nilai IDM > 0599 dan < 0,707
  - d. Desa Maju : Nilai IDM > 0,707 dan < 0,815
  - e. Desa Mandiri : Nilai IDM > 0.815

Tabel 15. Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Nama Desa	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	Bumi Jaya	0,8416	Mandiri
2	Sungai Riam	0,8675	Mandiri
3	Tampang	0,8425	Mandiri
4	Telaga	0,8127	Maju
5	Panjaratan	0,6822	Berkembang
6	Atu-Atu	0,8394	Mandiri
7	Panggung	0,8873	Mandiri
8	Tungkaran	0,7476	Maju
9	Ujung Batu	0,7921	Maju
10	Panggung Baru	0,7721	Maju
11	Ambungan	0,8559	Mandiri
12	Guntung Besar	0,6805	Berkembang
13	Kampung Baru	0,8356	Mandiri
14	Sumber Mulia	0,8968	Mandiri

15	Pemuda	0,8283	Mandiri
----	--------	--------	---------

Tabel 16. Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024 (Berkembang-Maju)

No	Nama Desa	Nilai IDM 2023	Status IDM 2023	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	Telaga	0,6683	Berkembang	0,8127	Maju
2	Tungkaran	0,6941	Berkembang	0,7476	Maju
3	Ujung Batu	0,6956	Berkembang	0,7921	Maju
4	Panggung Baru	0,694	Berkembang	0,7721	Maju

Tabel 17. Progres Perkembangan Indeks Desa Membangun Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024 (Maju-Mandiri)

No	Nama Desa	Nilai IDM 2023	Status IDM 2023	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
1	Sungai Riam	0,7337	Maju	0,8675	Mandiri
2	Tampang	0,7333	Maju	0,8425	Mandiri
3	Atu-Atu	0,7222	Maju	0,8394	Mandiri
4	Panggung	0,7837	Maju	0,8873	Mandiri
5	Ambungan	0,8095	Maju	0,8559	Mandiri
6	Kampung Baru	0,7559	Maju	0,8356	Mandiri
7	Pemuda	0,7449	Maju	0,8283	Mandiri

Dari Tabel di atas, tahun 2024 terdapat 7 desa yang mengalami kenaikan status dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri yang mana pada tahun 2023 Desa Mandiri hanya 2 desa sehingga berjumlah menjadi 9 Desa, 4 Desa mengalami kenaikan Status dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Dan 2 Desa yang masih dalam Status Berkembang.

Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan Pelaihari, Jumlah Desa yang Mandiri 9 Desa dengan Jumlah Desa 15 Desa dari target Rasio 0.60 dengan nilai Capaian Realisasi 0.60, berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, Rasio Desa Mandiri Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 termasuk kategori “**Sangat Memuaskan**”.

2. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisisioner yang dibagikan menggunakan kuisisioner manual dan kuisisioner online melalui aplikasi Buku Tamu Digital Kecamatan Pelaihari (BUDI TANRI) dengan QR kode yang disebarakan kepada pengguna layanan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah dari target 87,5 dengan nilai realisasi sebesar 95,59. Berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 termasuk kategori “**Sangat Memuaskan**”.

Nilai capaian IKU tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2023 memang mengalami peningkatan sebesar 7,55 dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 Realisasi IKM sebesar 3,522 (Mutu Pelayanan B) dari target 80, sementara pada Tahun 2024 realisasi IKM sebesar 3,824 (Mutu Pelayanan B) dari target 87,5 ada peningkatan realisasi IKM sebesar 0,302.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 18. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,787	10.5
2.	Prosedur	3.767	10.45
3.	Waktu Pelayanan	3.773	10.47
4.	Biaya / Tarif	3.960	11
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.753	10.42
6.	Kompetensi Pelayanan	3.767	10.45
7.	Perilaku Pelayanan	3.820	10.6
8.	Maklumat Pelayanan	3.840	10.65
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.980	11,05

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Penanganan Pangaduan, saran dan Masukan (3,980) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah

unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (3,753). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,407 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

**a. Eselon III (Camat)**

Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 Rasio Desa Mandiri mencapai 0.60 dari target sebesar 0,60 dengan persentase capaian 100% dan IKM mencapai 95,59 dari target sebesar 87,5 dengan persentase capaian 109,24. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,60	0,47	78.33
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5%	95,59 %	109.24
		Nilai SAKIP	80	77,1	96.37
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>94.65</b>

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2023-2024 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan				0,60	0,60	100
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,04	110,05	87,5	95,59	109,24
Nilai SAKIP	83	76,4	92,05	80	77,1	96,37

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

**1) Perbandingan Realisasi dengan Target:**

- a. Pada tahun 2024, Pencapaian Realisasi Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Pelaihari sebesar 100 % dengan target 0,60 dengan realisasi 0,60. Adapun Desa dengan status Desa Mandiri yang ada di Kecamatan Pelaihari tahun 2024 yaitu :

Tabel 21. Desa Mandiri di Kecamatan Pelaihari tahun 2024

Nama Desa	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
Bumi Jaya	0,8416	Mandiri
Sungai Riam	0,8675	Mandiri
Tampang	0,8425	Mandiri
Atu-Atu	0,8394	Mandiri
Panggung	0,8873	Mandiri
Ambungan	0,8559	Mandiri
Kampung Baru	0,8356	Mandiri
Sumber Mulia	0,8968	Mandiri
Pemuda	0,8283	Mandiri

- b. Pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dari target Tahun 2024 sebesar 95,59 dan dibandingkan dengan target realisasi 2023 maka pencapaian target 2024 mencapai 109,24%. Selain terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2023 ke 2024, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Pelaihari. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Pada tahun 2024 pencapaian realisasi nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari sebesar 77,1 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan pencapaian realisasi Nilai SAKIP 76,4

**2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

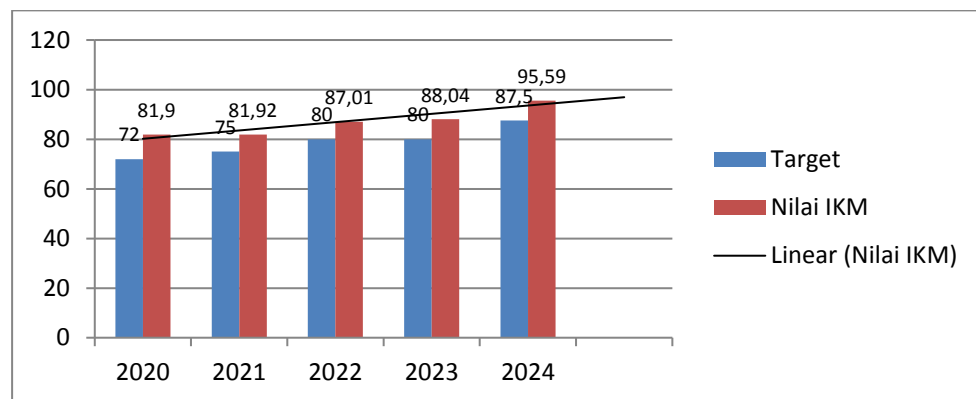
- a) Realisasi Rasio Desa Mandiri terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan serta capaian Kinerja tahun 2024 sebesar 100 %
- b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 dengan tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu 88,04 menjadi 95,59 sedangkan secara persentase terjadi penurunan 0,81 % dari capaian tahun 2024 sebesar 109,24 % dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 110,05%. Realisasi kinerja sampai dengan tahun

2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pelaihari tahun 2024 sebesar 87,5, maka realisasi 2024 sudah mencapai 8,09 dari target.

- c) Pesentase Capaian Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 96,47 % mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 4,42 % dengan Nilai 92,05 %.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari 2024-2026 dalam wujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan nilai 95,59.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IKM Tahun 2020-2024 Kantor Kecamatan Pelaihari dapat di lihat dari grafik tersebut dibawah ini :



Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2020-2024

### 3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan sarana prasarana pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari sesuai dengan kewenangan telah terlayani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan

Pelaihari. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2024.

Nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan jenis layanan dari tahun 2021-2024 dikarenakan tidak ada pengaduan permasalahan pelayanan dari masyarakat yang mengurus layanan perizinan dan layanan non perizinan karena dianggap bahwa aparatur Kecamatan Pelaihari telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan izin merasa dipermudah dan waktu yang cepat sampai izin selesai dikerjakan oleh aparatur Kecamatan Pelaihari.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut, Indeks Desa Membangun sampai dengan tahun 2024 pada Kecamatan Pelaihari terdapat 9 Desa Mandiri, 4 Desa Maju dan 2 Desa Berkembang. Desa di kualifikasikan dalam 5 (lima) kategori berdasarkan nilai Indeks yang diperoleh dari tiga komponen utama : Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan.

#### **4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 11.710.020.390,- (Sebelas milyar tujuh ratus sepuluh juta dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.922.483.844- (Sepuluh Milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) atau 93,27 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,624,412,670	9,862,671,491	92.83
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7,334,426	6,836,000	93.20
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29,563,404	29,266,792	99.00
4.	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,022,338	24,711,000	91.45
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,002,322,474	980,155,288	97.79
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,365,078	18,843,273	97.31
<b>JUMLAH</b>		<b>11,710,020,390</b>	<b>10,922,483,844</b>	<b>93.27</b>

Dalam mencapai capaian kinerja Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian 94,65 % Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
96,45 %	93,27%	3,18%

Target Rasio Desa Mandiri Kecamatan Pelaihari pada tahun 2024, 0,60 dengan realisasi 0,60. Adapun kendala Permasalahan yang di hadapai dalam mencapai target Rasio Desa Mandiri dikarenakan Pemerintah Desa belum sepenuhnya mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam perumusan Fokus dan Lokus Pembangunan Desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan desa bersifat spesifik sesuai indikator yang ada dalam IDM.

Upaya /solusi yang dilakukan dengan mendayagunakan hasil rumusan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam perumusan dan perencanaan pembangunan desa.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Kecamatan Pelaihari memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Desa untuk mendayagunakan hasil rumusan IDM dalam perumusan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pada tahun 2024 Kecamatan Pelaihari menetapkan target nilai IKM sebesar 87,5% sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 diperoleh realisasi nilai IKM 95,59 (**Mutu Pelayanan Baik**) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terdapat nilai IKM sebesar 8, 09 dari target yang ditetapkan.

Kendala permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pelaihari dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah sebagai berikut :

1. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
  2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan prima bagi masyarakat.
- Adapun upaya/solusi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur (SOP) dalam hal pengaduan, saran dan masukan dengan membuat banner/spanduk yang berisi tata cara alur dan mekanisme pengurusan perizinan/surat keterangan di Kecamatan Pelaihari.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Diskominfo) untuk pembuatan sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kotak pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk bahan evaluasi dan monitoring bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan membangun sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.

Selain itu diharapkan kerjasama dengan para stake holder terkait untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pelayanan di Kecamatan Pelaihari sesuai dengan harapan masyarakat.

## b. Eselon III (Sekretaris)

Tabel 24. Sasaran Strategis, Indikator, Target Sekretariat Kecamatan Pelaihari

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun			Tahun 2024		
		2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Komponen Perencanaan	24	25	26	24	23,1	96,25
2.	Nilai Komponen Pengukuran	24	25	26	24	24	100
3.	Nilai Komponen Pelaporan	12	12,5	12,7	12	11,25	93,75
4.	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	20,5	20,7	20	18,75	93,75

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun			Tahun 2024		
		2024	2025	2026	Target	Realisasi	Capaian
5.	Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	87	87,5	88	87	90	103,45
Rata-Rata Capaian Kinerja							97,44

Dalam mencapai capaian kinerja pada bagian sekretariat Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 97,44 %. Berdasarkan Survey Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Pelaihari per responden dan per unsur pelayanan berupa 30 lembar kuisisioner yang dibagikan terhadap 7 (tujuh) unsur pelayanan. Penyusunan Survei Pelayanan Kesekretariatan memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Administrasi Kepegawaian;
2. Administrasi Umum;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah;
4. Penunjang Kantor ;
5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah;
6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja;
7. Administrasi Keuangan;

Dari Survei Pelayanan Kesekretariatan di dapat nilai untuk Tahun 2024 adalah dari target 87, dengan nilai capaian sebesar 90,19, berdasarkan Tabel 14 tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, Indeks Kepuasan Kesekretariatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 termasuk kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Kesekretariatan terhadap 7 (tujuh) unsur pelayanan yakni :

Tabel 25. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Kesekretariatan 7 Unsur Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Administrasi Kepegawaian	3,70	12,95
2.	Administrasi Umum	3,77	13,18
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah	3,57	12,48
4.	Penunjang Kantor	3,60	12,6
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	3,67	12,83
6.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3,77	13,18
7.	Administrasi Keuangan	3,67	12,83

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Administrasi Umum, dan Unsur Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (3,77) sedangkan unsur yang

Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Pengadaan Barang Milik Daerah (3,57). Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,68 hal ini menggambarkan bahwa penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan Kesekretariatan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas.

### 1) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait;

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 berdasarkan Komponen penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai		Keterangan
		2023	2024	
1.	Perencanaan Kinerja	23,1	23,1	
2.	Pengukuran kinerja	22,5	24	
3.	Pelaporan kinerja	11,55	11,25	
4.	Evaluasi internal	19,25	18,75	
Jumlah		76,4	77,1	

Sumber data : Rekap hasil evaluasi SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2023-2024

Realisasi nilai SAKIP tahun 2023 dengan tahun 2024 mengalami kenaikan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 76,40 sedangkan tahun 2024 sebesar 77,1 .

### 2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Pelaihari. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat

### 3) Analisa Penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan pada bagian Sekretariat Kecamatan Pelaihari dibantu oleh 9 (Sembilan) orang ASN dan PTT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27. Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat

NO	JABATAN	ASN	PTT
1	Sekretaris	1	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	
4	Bendahara	1	
5	Verifikator	1	
6	Analisis Tata Laksana		
7	Pengadministrasi Umum	1	
8	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	

NO	JABATAN	ASN	PTT
9	Petugas Operator Keuangan		1
10	Petugas Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian		2
Jumlah		7	3

#### 4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 10.624.412.670,-. (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 9.862.671.491,- (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebesar 92,83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.624.412.670,-	Rp. 9.862.671.491,-	92,83%

Realisasi capaian keuangan pada bagian sekretariat Kecamatan Pelaihari sebesar 92,83 %, dengan efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 29. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Bagian Sekretariat Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
97,44 %	92,83%	4,61 %

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
  - b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
  - c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
  - a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Pelaihari sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
  - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Pelaihari dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.
  - c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2023 Kecamatan Pelaihari.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai saki yaitu :
 

Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

**c. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)**

Kecamatan Pelaihari sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Pelaihari. Ada 5 (lima) Program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Pelaihari. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

**1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Tabel 30. Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
KINERJA KEGIATAN				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
<b>KKINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>100%</b>

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100%. Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi baik mengelola administrasi pemerintahan desa dan dan Pelaksanakan kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap batas wilayah suatu desa dalam memenuhi aspek teknis dan yuridis.



Gambar 2. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan laporan kependudukan melalui aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) sehingga desa yang menyusun laporan tersebut data kependudukannya terverifikasi secara akurat.

Sedangkan Pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kependudukan juga terlaksana pada 15 (lima belas) desa dan 5 Kelurahan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat se Kecamatan Pelaihari yang terdiri dari 15 Desa dan 5 Kelurahan terkait perubahan data kependudukan, pindah domisili dan

pembuatan akte kependudukan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data penduduk laki-laki dan data penduduk perempuan serta jumlah kelahiran penduduk serta jumlah kematian penduduk untuk data bantuan sosial, data pemilih pada pemilu sehingga mencakup data yang terbaru.

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata Pemerintahan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas). Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD, Memfasilitasi Penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat Desa dan BPD dan Memonitoring penyusunan laporan kependudukan.

**b) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi Tata Pemerintahan**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan ditunjang dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp.8.231.126,- (Delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu serratus dua puluh enam rupiah) terealisasi Rp. 7.913.273,- (Tujuh juta Sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 96,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 31. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rp 8.231.126,-	Rp. 7.913.273,-	96,14 %
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
-	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 96,14%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 32. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	96,14%	3.86%

**c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan**

Belum optimalnya administrasi pemerintahan desa terutama dalam penjaringan dan penyaringan calon anggota perangkat desa dan calon anggota administrasi BPD

**d) Solusi kendala/Permasalahan yang dihadapi Seksi Tata Pemerintahan**

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Anggota tim penjaringan dan penyaringan akan diberikan arahan oleh Camat Pelaihari
2. Anggota tim penjaringan dan penjaringan lebih memahami lagi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 116 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon perangkat Desa.

**e) Rencana aksi yang akan dilakukan Seksi Tata Pemerintahan**

1. Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa 1 kali dalam setahun.
2. Lebih sering lagi untuk melakukan monitoring / evaluasi ke Desa minimal 4 triwulan.

**2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Realisasi capaian kinerja Kasi Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Pelaihari terhadap target hanya mencapai 91,67%. Hal ini

dikarenakan dari 15 Desa hanya 10 Desa yang BUMDesnya secara operasional berjalan dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Meningkatnya Layanan Terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	66,67%	66,67%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Terlaksananya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	100%
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>91,67%</b>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Fasilitasi pemasaran hasil produksi BUMDes dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, sewa tenda, asinan buah tetap berjalan sampai dengan sekarang. BUMDes yang masih aktif, yaitu :

1. Desa Sumber Mulia toko atk dan budidaya ternak sapi
2. Desa Tungkaran alat komben
3. Kampung Baru catering, pupuk, dll
4. Sungai Riam budidaya sapi
5. Desa Tampang
6. Desa Pemuda
7. Desa Atu-Atu
8. Desa bumi jaya
9. Desa Telaga

## 10. Desa Guntung

4 Desa yang BUMDes yang belum berjalan Optimal dikarenakan adanya :

1. Desa Penjaratan BUMDesnya pernah aktif tapi vakum sejak bergantinya Kepala Desa.
2. Desa Panggung Baru, Pengurusnya aktif tapi belum ada modal usaha.
3. Desa Ambungan, Aset BUMDesnya masih ada tapi kepengurusannya sudah bubar.
4. Desa Ujung Batu, BUMDesnya sudah lama tidak aktif lagi.



Gambar 3. Fasilitas Pemasaran Produk BUMDes di Stand Kecamatan Pelaihari Pada Pameran Pembangunan Hari Jadi Tanah Laut ke 59

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Pelaihari dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan tahun 2024 dilaksanakan perdapil di Kecamatan Bajuin. Dengan menghadirkan utusan 15 Desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 4. Pelaksanaan Musrenbang Desa Kecamatan Pelaihari di Kecamatan Bajuin

Kegiatan selanjutnya pada Seksi PMD/K pada Kecamatan Pelaihari juga melaksanakan Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan pada 15 Desa se Kecamatan Pelaihari yang difasilitasi oleh Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Kecamatan Pelaihari.



Gambar 5. Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari

Hal ini sebagai perwujudan pengawasan penatausahaan keuangan desa baik Dana Desa dari Dana Kemendesa dan PDT maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi PMD/K**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Plt. Kasi PMD/K (Pelaksana) ASN dengan

kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD/K yaitu melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Pelaksanaan Evaluasi APBDDes, Evaluasi APBDDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya.

**b) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi PMD/K**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi PMD/K di tunjang dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 40.697.356,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah rupiah) terealisasi Rp. 40.196.792,- (Empat puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sebesar 98,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 34. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rp. 11.133.952,-	Rp. 10.930.000,-	98.17%
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 1.556.384,-	Rp. 1.540.000,-	98.95%
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rp 29.563.404,-	Rp. 29.266.792,-	99%
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
	Total	Rp. 40.697.356,-	Rp. 40.196.792,-	98,77%

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi PMD/K Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi PMDK Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
91,67%	98,77%	-

**c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K**

1. Terbatasnya usulan perencanaan pembangunan pada hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan bagi aparatur desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun Dana Desa dari Kementrian Desa dan PDT yang berasal dari Dana APBN.

**d) Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K**

1. Melakukan skala prioritas untuk usulan perencanaan pembangunan serta pendekatan kepada anggota legislatif sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan pada usulan pokok pikiran (pokir) DPRD.

2. Melakukan indentifikasi program dan kegiatan desa yang di susun oleh aparatur desa akan di selaraskan dengan Rencana Kerja SKPD, RPJMD dan visi misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sehingga percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat direalisasikan bagi masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam penataan administrasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang di dukung dengan aplikasi sistem manajemen keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

**e) Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Seksi PMD/K yaitu :**

1. Meningkatkan perbaikan kualitas rancangan kerja awal usulan perencanaan pembangunan yang terdiri dari usulan aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) dimulai Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan.
2. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal, dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk penyusunan standar satuan harga (SSH) dan Pelaporan Aset Desa sebagai lampiran penyusunan Laporan Keuangan Desa.

### 3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 36. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	2 Jenis	2 Jenis	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>100%</b>

Realisasi capaian kinerja Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100%. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat mencerminkan komitmen Kecamatan Pelaihari dan lembaga terkait dalam memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kemudahan akses terhadap layanan sosial, penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan program pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan sosial.

Monitoring penyaluran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Pelaihari melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun jenis penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Pelaihari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Beras (BSB)

Fasilitasi di bidang keagamaan Kec. Pelaihari mengirimkan Kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2024 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Jorong, kafilah Kecamatan Pelaihari mendapatkan juara 1 se Kabupaten Tanah Laut untuk 3 tahun berturut-turut.



Gambar 6. Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 di Kecamatan Jorong

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan kasi kemasyarakatan yakni Safari Ramadhan dan buka Puasa Bersama Pj. Bupati Tanah Laut bersama masyarakat pada bulan ramadhan.



Gambar 7. Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Ambungan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan Kasi Kemasyarakatan yaitu Sosialisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Tanah Laut. Untuk Tahun 2026 yang menerima hibah sebanyak 6 organisasi dengan jumlah organisasi yang merealisasikan sebanyak 6 organisasi.

Proses pengajuan dan evaluasi hibah sering kali memakan waktu lama dan kurang efisien karena masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan, kurangnya transparansi, serta menyulitkan masyarakat dalam melacak status permohonan mereka. Menanggapi kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih modern dan transparan, Kecamatan Pelaihari menghadirkan inovasi dengan meluncurkan aplikasi digital bernama *SI ENAK* (Sistem Evaluasi Permohonan dan Monitoring Hibah Kecamatan). Aplikasi ini dirancang untuk mengelola permohonan hibah secara lebih efektif, cepat, dan akuntabel, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kecamatan Terinovatif pada *Ajang Tanah laut Innovation Award 2024*.



Gambar 8. Camat Pelaihari Menerima Penghargaan Tanah Laut Innovation Award 2024

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Pelaihari mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 di Kec. Jorong, kegiatan Safari Ramadhan Ramadhan bersama Pj. Bupati Tanah Laut beserta masyarakat

pada bulan ramadhan Tahun 1445 h di Desa Ambungan, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

**b) Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatannya Seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 964.377.805,- (Sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 943.401.428,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 97,82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 37. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 964.377.805,-	Rp. 943.401.428,-	97.82 %
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 38. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	97.82%	2.18%

**c) Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran hibah**

Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan dalam melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta

pelaporan dana hibah karena kuitansi yang dibelanjakan tidak mengikuti RAB pencairan dan lampiran pendukung SPJ nya.

**d) Solusi yang dilakukan dalam penyaluran hibah yaitu :**

Melakukan Sosialisasi Penatausahaan, Pertanggung jawaban, dan Pelaporan Hibah kepada organisasi penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e) Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu :**

Menyusun draft tahapan penyampaian dan verifikasi proposal, serta menyesuaikan satuan standar harga yang dibuat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut sehingga rencana anggaran biaya (RAB) memakai Standar Harga Pemerintah Daerah dengan bimbingan Seksi Kemas Kecamatan Pelaihari.

**4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Tabel 39. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah gangguan Kamtibmas yang tertangani	2 Laporan	1 Laporan	50%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>83%</b>

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 15 (lima belas) desa dan 5 (lima) Kelurahan yang ada di kecamatan Pelaihari.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pelaihari yang di monitoring selama tahun 2024 terealisasi 1 (satu) laporan penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Pelaihari ke warung-warung malam. Melakukan

penertiban dan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.



Gambar 9. Operasi Gabungan Penertiban Warung Malam

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Trantib (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu melakukan kegiatanfasilitasi penanganan gangguan dan keamanan, membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentaman dan ketertiban .

**b) Analisis mengenai Sumber Daya Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi PMD/K di tunjang dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 56.378.650,- (Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 55.725.660,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam

ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 98,84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 40. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
a.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.022.338,-	Rp. 24.711.000,-	91.45%
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 37.944.669,-	Rp. 36.753.860,-	98.86%
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
<b>Total Anggaran</b>		<b>Rp. 64.967.007,-</b>	<b>Rp 61.464.860-</b>	<b>94.61%</b>

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
83%	94.61%	-

### c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Rendahnya kesadaran pemilik warung dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena itu merupakan penghasilan dari warga pemilik warung atau lahan sedangkan mereka tidak menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dengan maraknya warung-warung tersebut

**d) Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dengan meminta bantuan dan dukungan dari para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat beserta forkompimcam Kecamatan Pelaihari untuk menjaga Ketentraman dan ketertiban

**e) Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :**

Melakukan sinergi dan koordinasi kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah

**5) Kepala Seksi Pelayanan**

Tabel 42. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>100%</b>

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pelaihari, salah satu kegiatan yang dilaksanakandalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2024 memperoleh IKM sebesar 3,824 (95.59) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Kecamatan Pelaihari telah mengembangkan aplikasi yang diberi nama BUDI TANRI (Buku Digital Kecamatan Pelaihari). Aplikasi ini bertujuan untuk merekap data jenis pelayanan yang diterima oleh

masyarakat, sehingga memudahkan Seksi Pelayanan dalam menyusun SKM secara lebih efektif dan efisien

Gambar 8. Aplikasi BUDI TANRI

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2024 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Pelaihari. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2024 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	121	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	14	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	1041	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	425	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	-	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	6	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	7	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	-	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Seksi Pelayanan
16	Pelayanan Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
17	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95.59% dari 150 responden yang mengisi kuisioner.



Gambar 9. Forum Konsultasi Publik tahun 2024

Kecamatan Pelaihari pada tahun 2024 melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 2 (dua) orang Non PNS dengan menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

**b) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Kasi Pelayanan**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi Pelayanan di tunjang dengan 1 (satu) Program, 1 (dua) Kegiatan dan 1 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 7.334.426,- (Tujuh Juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp. 6.836.000,- (Enam juta

delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 93.20%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 44. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 7.334.426,-	Rp. 6.836.000,-	93.20 %
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Pelayanan Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 45. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	93,20%	6,8%

**c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah belum adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari yang terhubung dengan Kelurahan dan Pemerintah Desa.

**d) Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu Mencoba mengembangkan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai IKM yaitu :

- ❖ Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengembangan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- ❖ Melakukan pembuatan media sosial untuk mendukung informasi akan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan

sebagai sarana informasi publik terhadap kinerja Kecamatan.

**e) Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Seksi Pelayanan**

Melakukan komitmen pelayanan sesuai Zona Integritas (ZI) yang kuat pada personel/SDM Kecamatan Pelaihari agar pelayanan terpadu kecamatan kepada masyarakat lingkup Kecamatan Pelaihari.

**6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tabel 46. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%
Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Capaian Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	100%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 paket	11 paket	100%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	100%
Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100%
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>100%</b>

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (Satu) orang Kasubbag Umum & Kepegawaian (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 (dua) orang orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 2 (dua) orang Non PNS dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.

**b) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Umum & Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2024, sub bagian umum dan kepegawaian ditunjang oleh 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 843.787.087,- (Delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah)., dengan realisasi sebesar Rp. 814.371.629,- (Delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 96,51 %.

Tabel 47. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	843.787.087,00	814.371.629,00	96,51
a.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.866.450,00	15.120.000,00	89,65
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.866.450,00	15.120.000,-	89,65
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.492.214,00	420.022.456,00	93,86
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.222.478,00	5.575.832,00	89,61
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.533.002,00	109.672.409,00	90,25
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.695.456,00	7.105.012,00	81,71
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.916.448,00	11.684.500,00	83,96
-	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.750.000,00	283.717.739,00	99,99
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.121.948,00	9.900.000,00	89,01
c.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.209.321,00	25.500.000,00	87,30
-	Pengadaan Mebel	29.209.321,00	25.500.000,00	87,30
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.521.984,00	232.014.363,00	97,84
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.500.000,00	49.582.319,00	92,68
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984,00	205.642.800,00	99,33
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.950.000,00	75.459.144,00	97,62
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.911.493,00	99,70
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	39.529.525,00	98,82
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000,00	6.430.000,00	92,52

Dalam mencapai capaian kinerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari dengan realisasi

capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	96,51%	3,49%

**c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah kurangnya Staf/ASN pengelola kearsipan dan Pengelola Teknologi informasi dalam mengerjakan tugas mengelola arsip dan mengelola Teknologi informasi di Kecamatan Pelaihari.

**d) Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Melakukan usulan penambahan personel staf/ASN pengelola kearsipan yang mempunyai keahlian menyusun arsip, menata arsip, didukung sarana dan prasarana ruang arsip yang memadai dan Pengelola Teknologi informasi yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di kantor kecamatan serta menjaga integritas dan keamanan informasi administratif.

**e) Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Memberdayakan pegawai PTT yang ada membantu dalam mengelola kearsipan dan mengelola Teknologi Informasi yang ada di Kecamatan Pelaihari.

**7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tabel 49. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA KEGIATAN</b>				
Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Bersih dan Optimal	Persentase Capaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	66 Orang	94.29%
Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>99,05%</b>

**a) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 1 (satu) orang Non ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

**b) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2024, sub bagian Keuangan dan Perencanaan ditunjang oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.769.147.647,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh tujuh rubu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 8.941.527.114,- (Delapan milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah) atau sebesar 92,51 %

Tabel 50. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.780.625.583,00	9.048.299.862,00	92,51
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.585.200,00	5.000.000,00	89,52
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.980.250,00	3.500.000,00	87,93
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.604.950,00	1.500.000,00	93,46
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.775.040.383,00	9.043.299.862,00	92,51
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.773.949.859,00	9.042.280.662,00	92,51
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.090.524,00	1.019.200,00	93,46

Dalam mencapai capaian kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Pelaihari memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 51. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,05%	96,51%	2,54%

**c) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Kurangnya personel staf/ASN yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan

manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI dan Kemenkeu RI.

**d) Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Melakukan usulan anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimtek, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah

**e) Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2024 untuk eselon IV mencapai 100 %. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2024 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 52. Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
<b>Kinerja Kegiatan</b>				
1	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%	100%
2	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%	66,67%	66.67%
3	Jumlah gangguan Kamtibmas yang tertangani	2 Laporan	1 Laporan	50%
4	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100%
5	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
6	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
7	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%
8	Persentase Capaian Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
9	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
10	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
11	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
12	Persentase Capaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
<b>Kinerja Sub Kegiatan</b>				
1	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	100%
3	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
5	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
7	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	2 jenis	2 jenis	100%
8	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%
9	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
10	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
11	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	100%
12	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 paket	11 paket	100%

No	Indikator Kinerja	2024		
		Target	Realisasi	Capaian
13	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
14	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
15	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	100%
16	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
17	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
18	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
20	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
21	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100%
22	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	100%
23	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
24	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
25	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	66 Orang	94.29%
26	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>				<b>97.66%</b>

Dari 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan yang diamanatkan kepada Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 12.368.743.278.- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 1.710.020.390,-. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 10.922.483.844,- dengan capaian sebesar 93,27 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 53 . Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)		TARGET S.D TW IV		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	FISIK (%)	KEUANGAN (RP)	FISIK (%)	KEUANGAN	
							RP	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.269.819.965,00</b>	<b>10.624.412.670,00</b>	100,00%	10.624.412.670,00	94,75%	9.862.671.491,00	92,83%
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.745.685,00</b>	<b>5.585.200,00</b>	100,00%	5.585.200,00	100,00%	5.000.000,00	89,52%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.140.735,00	3.980.250,00	100,00%	3.980.250,00	100,00%	3.500.000,00	87,93%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.604.950,00	1.604.950,00	100,00%	1.604.950,00	100,00%	1.500.000,00	93,46%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.525.435.310,00</b>	<b>9.775.040.383,00</b>	100,00%	9.775.040.383,00	94,29%	9.043.299.862,00	92,51%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.523.435.371,00	9.773.949.859,00	100,00%	9.773.949.859,00	94,29%	9.042.280.662,00	92,51%
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.999.939,00	1.090.524,00	100,00%	1.090.524,00	100,00%	1.019.200,00	93,46%
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>21.189.900,00</b>	<b>16.866.450,00</b>	100,00%	16.866.450,00	100,00%	15.120.000,00	89,65%
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.189.900,00	16.866.450,00	100,00%	16.866.450,00	100,00%	15.120.000,00	89,65%
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>356.067.765,00</b>	<b>460.239.332,00</b>	100,00%	460.239.332,00	100,00%	442.655.492,00	96,18%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.222.478,00	6.222.478,00	100,00%	6.222.478,00	100,00%	5.575.832,00	89,61%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.142.376,00	121.533.002,00	100,00%	121.533.002,00	100,00%	109.672.409,00	90,24%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.695.456,00	8.695.456,00	100,00%	8.695.456,00	100,00%	7.105.012,00	81,71%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.916.448,00	13.916.448,00	100,00%	13.916.448,00	100,00%	11.684.500,00	83,96%
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	26.969.059,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.000.000,00	283.750.000,00	100,00%	283.750.000,00	100,00%	283.717.739,00	99,99%
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.121.948,00	11.121.948,00	100,00%	11.121.948,00	100,00%	9.900.000,00	89,01%
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.209.321,00</b>	<b>29.209.321,00</b>	100,00%	29.209.321,00	100,00%	25.500.000,00	87,30%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	29.209.321,00	29.209.321,00	100,00%	29.209.321,00	100,00%	25.500.000,00	87,30%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.221.984,00</b>	<b>260.521.984,00</b>	100,00%	260.521.984,00	100,00%	255.225.119,00	97,97%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.200.000,00	53.500.000,00	100,00%	53.500.000,00	100,00%	49.582.319,00	92,68%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207.021.984,00	207.021.984,00	100,00%	207.021.984,00	100,00%	205.642.800,00	99,33%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.950.000,00</b>	<b>76.950.000,00</b>	100,00%	76.950.000,00	100,00%	75.871.018,00	98,60%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.911.493,00	99,70%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	40.000.000,00	100,00%	39.529.525,00	98,82%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.950.000,00	6.950.000,00	100,00%	6.950.000,00	100,00%	6.430.000,00	92,52%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabel 53 . Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)		TARGET S.D TW IV		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	FISIK (%)	KEUANGAN (RP)	FISIK (%)	KEUANGAN	
							RP	%
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	7.334.426,00	7.334.426,00	100,00%	7.334.426,00	100,00%	6.836.000,00	93,20%
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	7.334.426,00	7.334.426,00	100,00%	7.334.426,00	100,00%	6.836.000,00	93,20%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.334.426,00	7.334.426,00	100,00%	7.334.426,00	100,00%	6.836.000,00	93,20%
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	40.205.198,00	29.563.404,00	100,00%	29.563.404,00	100,00%	29.266.792,00	99,00%
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	40.205.198,00	29.563.404,00	100,00%	29.563.404,00	100,00%	29.266.792,00	99,00%
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.205.198,00	29.563.404,00	100,00%	29.563.404,00	100,00%	29.266.792,00	99,00%
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	0,00	27.022.338,00	100,00%	27.022.338,00	100,00%	24.711.000,00	91,45%
7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	0,00	27.022.338,00	100,00%	27.022.338,00	100,00%	24.711.000,00	91,45%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	27.022.338,00	100,00%	27.022.338,00	100,00%	24.711.000,00	91,45%
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	1.006.402.474,00	1.002.322.474,00	100,00%	1.002.322.474,00	100,00%	980.155.288,00	97,79%
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	1.006.402.474,00	1.002.322.474,00	100,00%	1.002.322.474,00	100,00%	980.155.288,00	97,79%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	964.377.805,00	964.377.805,00	100,00%	964.377.805,00	100,00%	943.401.428,00	97,82%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	42.024.669,00	37.944.669,00	100,00%	37.944.669,00	100,00%	36.753.860,00	96,86%
7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	44.981.215,00	19.365.078,00	100,00%	19.365.078,00	100,00%	18.843.273,00	97,31%
7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	44.981.215,00	19.365.078,00	100,00%	19.365.078,00	100,00%	18.843.273,00	97,31%
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.981.794,00	9.577.568,00	100,00%	9.577.568,00	100,00%	9.390.000,00	98,04%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.666,00	1.556.384,00	100,00%	1.556.384,00	100,00%	1.540.000,00	98,95%
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9.999.755,00	8.231.126,00	100,00%	8.231.126,00	100,00%	7.913.273,00	96,14%
<b>JUMLAH</b>		<b>12.368.743.278</b>	<b>11.710.020.390</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.710.020.390</b>	<b>95,23%</b>	<b>10.922.483.844</b>	<b>93,27%</b>

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Pelaihari pada tahun 2024 menganggarkan jumlah Anggaran Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 12.368.743.278.-.

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 11.710.020.390,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 10.922.483.844,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 93,27% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 787.536.546.- (6.73%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 54. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI (Rp).	(%)
1	BELANJA	12.368.743.278,-	11.710.020.390,-	10.922.483.844,-	93,27
	a. BELANJA OPERASI	12.284.905.102,-	11.590.791.588,-	10.812.322.935,-	93,28
	b. BELANJA MODAL	83.838.176,-	119.228.802,-	110.160.909,-	73,58

Tabel 55. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Pelaihari

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	%
1.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pelaihari	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.624.412.670	9.862.671.491	92,83
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.334.426	6.836.000	93,20
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	29.563.404	29.266.792	99,00
		Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.022.338	24.711.000	91,45
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.002.322.474	980.155.288	97,79
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.365.078	18.843.273	97,31
<b>JUMLAH</b>			<b>11.710.020.390</b>	<b>10.922.483.844</b>	<b>93,27</b>

### 2. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Pada tahun 2023 ada 5 Program dan 7 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dibandingkan tahun 2024 ada 6 program dan 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 11.710.020.390,- (Sebelas

milyar tujuh ratus sepuluh juta dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.862.514.803,- (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah). Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 56. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2024

TAHUN 2023			TAHUN 2023		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
5	7	23	6	12	26
<b>Total Anggaran</b>			<b>Total Anggaran</b>		
Rp. 11.862.514.803,-			Rp. 11.710.020.390,-		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.922.483.844,- (Sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 10.904.945.967,- (Sepuluh milyar sembilan ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023-2024

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2023	2024
1.	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	<b>BELANJA</b>	Rp.10.904.945.967,-	Rp.10.922.483.844,-
	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 10.770.153,399,-	Rp. 10.812.322.935,-
	Belanja Pegawai	Rp. 8.937.102.114,-	Rp 9.042.280.662,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.904.611.285,-	Rp .993.067.053,-
	Belanja Hibah	Rp 928.440.000,-	Rp 776.975.220,-
	<b>BELANJA MODAL</b>	Rp. 134.792.568,-	Rp. 110.160.909,-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 134.792.568,-	Rp. 110.160.909,-
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 0,-	Rp. 0,-

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2024-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan**, yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 94,65%.

### **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Pelaihari
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascadedown*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
5. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam Diklat/Bimtek bagi pegawai lama.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya

Demikian laporan kinerja Kecamatan Pelaihari ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2025

Camat Pelaihari,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

**AGUS SETIYO, S.STP, M.M**

**Pembina Tk.I / (IV/b)**

**NIP. 19850808 200412 1 001**

**LAMPIRAN**


Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari**

- Kabupaten : Tanah Laut
- Nama SKPD : Kecamatan Pelaihari
- Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- Fungsi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  - g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	

**CAMAT PELAIHARI,**



**AGUS SETIYO, S.STP, M.M**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 1 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/72/LHE AKIP– Irbn III/Insp/ 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

Kepada Yth.  
Camat Pelaihari  
di-  
Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Kecamatan Pelaihari dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan;
- g. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/108/ Insp/ 2024 tanggal 14 Maret 2024.

## 2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## 3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD;
- b. Renja SKPD;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK);
- f. Cascading;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

## 4. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar **77,10** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,10
b. Pengukuran Kinerja	30	22,50	24,00
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	11,25
d. Evaluasi Internal	25	19,25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,40	77,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

#### 5. Catatan Hasil Evaluasi

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Kecamatan Pelaihari tahun 2023 sebagai berikut:

##### a. Perencanaan Kinerja

Dari segi komponen perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan;
- 2) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam perencanaan kinerja;
- 3) Dokumen perencanaan belum sesuai dengan sistematika penyusunan

##### b. Pengukuran Kinerja

Dari segi komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) namun belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran;
- 2) SKPD telah melakukan perubahan Renja, namun perubahan tersebut belum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan);

##### c. Pelaporan Kinerja

Dari segi komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja berkala telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja;

2) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

3) Laporan kinerja belum menyajikan analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya.

d. Evaluasi Internal

SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Inspektorat) tahun sebelumnya, namun belum sepenuhnya sesuai.

**6. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan/catatan diatas, dalam rangka implementasi akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

1) Dalam Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan;

2) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (*feedback*) yang jelas;

3) Agar dokumen perencanaan disesuaikan dengan sistematika penyusunan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan);

2) Dalam melakukan perubahan Renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.

c. Pelaporan Kinerja

1) Laporan kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran;

2) Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

3) Laporan Kinerja yang disusun agar menyajikan analisa terhadap efisiensi penggunaan sumber daya.

d. Evaluasi Internal

1) Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023 dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut;

- 2) Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi per triwulan tahun 2024 kepada Inspektur Kabupaten Tanah Laut;
- 3) Agar segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2022 yang belum sesuai.

#### **7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya Kecamatan Pelaihari sebagian besar telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Kecamatan Pelaihari telah melakukan upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelarasan terhadap indikator yang belum selaras pada dokumen perencanaan kinerja;
- b. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas pencapaian target kinerja;
- d. Memberikan reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati;
- e. Menunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Inspektur,  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650116 199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

**LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
UNIT KERJA : KECAMATAN PELAIHARI  
PERIODE EVALUASI 2023**

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>23,10</b>	<b>77,00%</b>
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6,00</b>	<b>BB</b>	<b>4,80</b>	<b>80,00%</b>
1)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
4)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
5)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
<b>1.b</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9,00</b>	<b>B</b>	<b>6,30</b>	<b>70,00%</b>
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable) dan realistis				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15,00</b>	<b>BB</b>	<b>12,00</b>	<b>80,00%</b>
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				
6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>24,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6,00</b>	<b>BB</b>	<b>4,80</b>	<b>80,00%</b>
1)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator				
2)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
<b>2.b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9,00</b>	<b>BB</b>	<b>7,20</b>	<b>80,00%</b>
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15,00</b>	<b>BB</b>	<b>12,00</b>	<b>80,00%</b>
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
7)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				
8)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>		<b>11,25</b>	<b>75,00%</b>
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3,00</b>	<b>BB</b>	<b>2,40</b>	<b>80,00%</b>
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya</b>	<b>4,50</b>	<b>BB</b>	<b>3,60</b>	<b>80,00%</b>
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>B</b>	<b>5,25</b>	<b>70,00%</b>
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>		<b>18,75</b>	<b>75,00%</b>
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5,00</b>	<b>BB</b>	<b>4,00</b>	<b>80,00%</b>
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit				
2)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah				
<b>4.b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7,50</b>	<b>BB</b>	<b>6,00</b>	<b>80,00%</b>
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman				
<b>4.c</b>	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja</b>	<b>12,50</b>	<b>B</b>	<b>8,75</b>	<b>70,00%</b>

No	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	NILAI	%-TASE
1)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
2)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100,00</b>		<b>77,10</b>	<b>77,10%</b>
<b>PREDIKAT</b>		<b>SANGAT BAIK</b>			

Kesimpulan Hasil Evaluasi :

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Wakil Penanggungjawab



Hj. Dwi Laksmi Yunika, ST. MT  
NIP. 19700629 199203 2 011

Evaluato



M. Khamdan Rosyid, SE  
NIP. 19901222 202203 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN  
Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Pj. BUPATI TANAH LAUT,



**SYAMSIR RAHMAN**

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Pertama  
CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan	0,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	87,5 (BB)
2	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pelaihari	Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	82 (A)

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.585.200,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.775.040.383,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 16.866.450,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 460.239.332,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 29.209.321,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 260.521.984,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76.950.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 7.334.426,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 29.563.404,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 27.022.338,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 1.002.322.474,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.365.078,00

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

CAMAT PELAIHARI,

  
**SYAMSIR RAHMAN**

  
**AGUS SETIYO, SSTP, MM**  
 NIP. 19850808 200412 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM.,M.Kes  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP,MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

Pihak Pertama  
SEKRETARIS CAMAT,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai Komponen Perencanaan	24
		Nilai Komponen Pengukuran	24
		Nilai Komponen Pelaporan	12
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	20
		Survey Pelayanan Kesekretariatan	87

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 10.624.412.670,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.585.200,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.775.040.383,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 16.866.450,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 460.239.332,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 29.209.321,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 260.521.984,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76.950.000,00

Pelaihari, 19 September 2024

CAMAT PELAIHARI,

SEKRETARIS CAMAT,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001



**M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELLINDA YUSUF, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PELAYANAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**HELLINDA YUSUF, S.SOS**  
NIP. 19790222 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Sesuai dengan Standar	Persentase Objek Pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	<b>7.334.426</b>
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian - Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.334.426

Pelaihari, 19 September 2024

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

KASI PELAYANAN,



**HELLINDA YUSUF, S.Sos**  
NIP. 19790222 200604 2 012



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIAH, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

Pihak Pertama  
KASI TATA PEMERINTAHAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**NURIAH, S.Sos**  
NIP. 19740320 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Terwujudnya Desa yang Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>8.231.126</b>
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan - Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.231.126

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN,



**NURIAH, S.Sos**  
NIP. 19690703 199103 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SYAFRIANDI NOOR, SE  
Jabatan : KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN,

**M. SYAFRIANDI NOOR, SE**  
NIP. 19770121 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Tertelaksananya Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	Jumlah Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial	2 jenis

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 964.377.805,00
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Antar Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 964.377.805,00

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 19 September 2024

KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN,



**M.SYAFRIANDI NOOR, SE**  
NIP. 19770121 200701 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT AMINUDDIN, S.I.Kom  
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**RAHMAT AMINUDDIN, S.I.Kom**  
NIP. 19901023 101502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Meningkatnya Layanan Terhadap Perekonomian Masyarakat	Persentase BUMDes yang Operasionalnya Berjalan Baik	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen
3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>11.133.952</b>
		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.577.568
		- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.556.384
2	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>29.563.404</b>
		- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.563.404

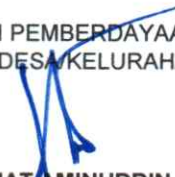
Pelaihari, 19 September 2024

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN



**RAHMAT AMINUDDIN, S.I.Kom**  
NIP. 19901023 201502 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. HENY YULIANA, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : CAMAT PELAIHARI  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
CAMAT PELAIHARI,

Pihak Pertama  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**Hj. HENY YULIANA, S.Sos**  
NIP. 19690402 199002 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Meningkatnya Pembinaan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah gangguan Kamtibmas yang tertangani	2 Laporan
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 27.022.338,00
		- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 27.022.338,00
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 37.944.669,00
		- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 37.944.669,00

Pelaihari, 19 September 2024

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP.M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,



**Hj. HENY YULIANA, S.SOS**  
NIP. 19690402 199002 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENNY SUSILAWATI, A.Md  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM,M.Kes  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS CAMAT,

Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes  
NIP. 19671013 198803 1 004

ENNY SUSILAWATI, A.Md  
NIP. 19820125 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Menciptakan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Umum yang Optimal	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	100%
3	Memastikan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Capaian Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
4	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan Baik	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
5	Memastikan Barang Milik Daerah Terpelihara dengan Baik	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Paket
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 paket
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
6	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket
7	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan
8	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
9	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit
14	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 16.866.450,00
		- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 16.866.450,00
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 460.239.332,00
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.222.478,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 121.533.002,00
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.695.456,00
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 13.916.448,00
		- Penyediaan Bahan/Material	Rp 15.000.000,00
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 283.750.000,00
		- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 11.121.948,00
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 29.209.321,00
		- Pengadaan Mebel	Rp 29.209.321,00
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 260.521.984,00
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 53.500.000,00
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 207.021.984,00
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 76.950.000,00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.000.000,00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 40.000.000,00
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.950.000,00

Pelaihari, 19 September 2024

SEKRETARIS CAMAT ,



**M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**ENNY SUSILAWATI, A.Md**  
NIP. 19820125 200901 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINNI AULIA, SE  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM.,M.Kes  
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pihak Kedua  
SEKRETARIS CAMAT,

**M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,

**RINNI AULIA, SE**  
NIP. 19830619 200604 2 015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KINERJA KEGIATAN</b>			
1	Memastikan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Tersusun dengan Baik	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Menciptakan Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Bersih dan Optimal	Persentase Capaian Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
<b>KINERJA SUB KEGIATAN</b>			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang
4	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.585.200,00
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.980.250,00
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.604.950,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.775.040.383,00
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 9.773.949.859,00
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.090.524,00

Pelaihari, 19 September 2024

SEKRETARIS CAMAT .



**M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

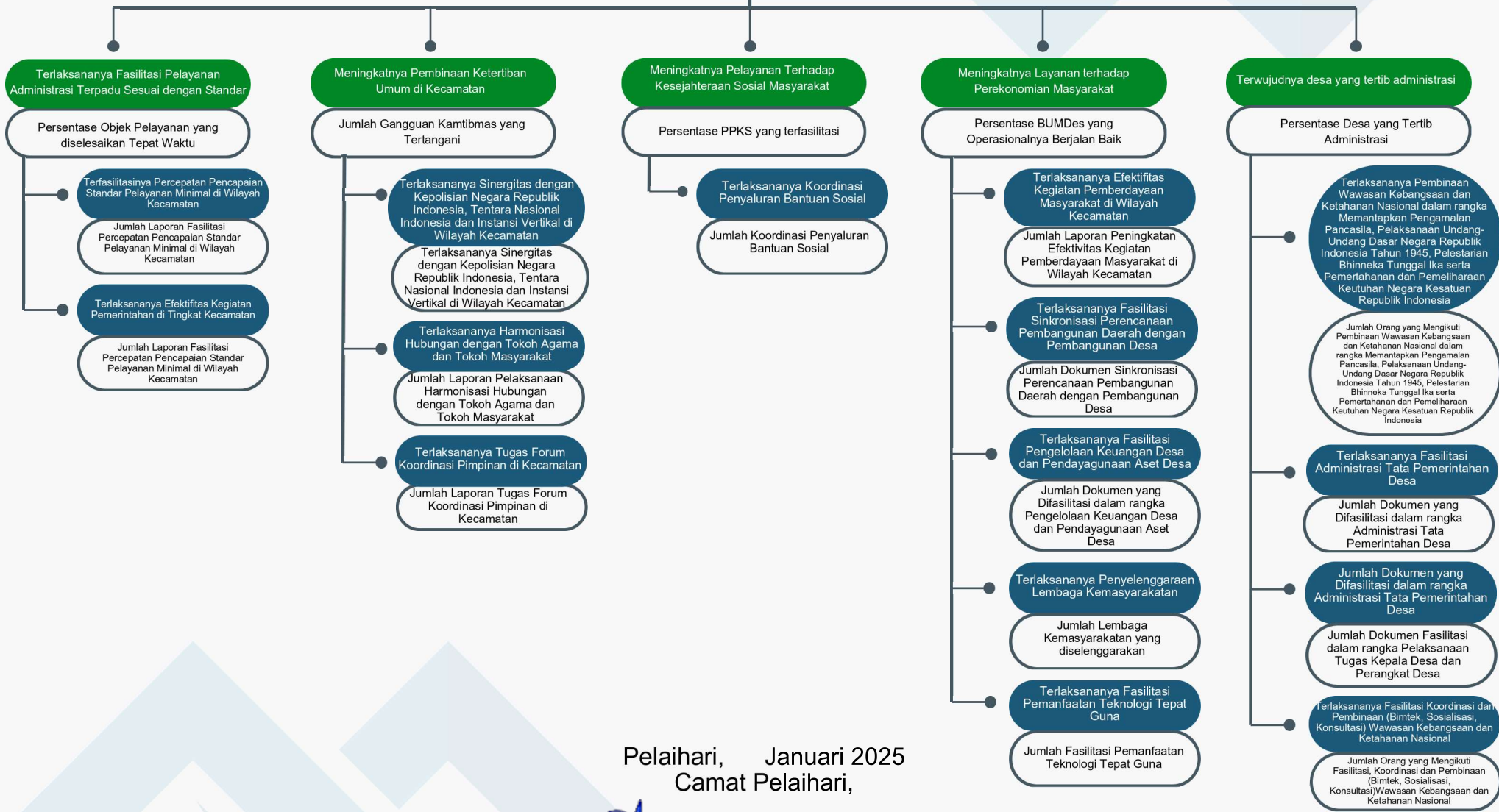
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



**RINNI AULIA, SE**  
NIP. 19830619 200604 2 015

**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik**

- 1. Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat



Pelaihari, Januari 2025  
Camat Pelaihari,

**AGUS SETIYO, S.STP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024  
KECAMATAN PELAIHARI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan sekretariat perangkat daerah (Nilai)	0,00	36.159.642.498	0,00	-	88	10.624.412.670	2.608.722.648	2.771.507.491	2.357.630.756	2.124.810.596	9.862.671.491	0,00%	92,83%	87,50	9.862.671.491	0,00%	27,28%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	100,00	64.500.000	0,00	-	0	5.585.200	1.900.000	900.000	2.200.000	5.000.000	0,00%	89,52%	0,00	5.000.000	0,00%	26,14%						
			Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)			0,00	-	1						0,00%		0,00		0,00%							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )		57.000.000	0,00	-	7	3.980.250	2	1.900.000	-	5	1.600.000	7	3.500.000	100,00%	87,93%	7,00	3.500.000	0,00%	6,14%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )		7.500.000	0,00	-	5	1.604.950	-	3	900.000	-	2	600.000	5	1.500.000	100,00%	93,46%	5,00	1.500.000	0,00%	20,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		28.844.177.355	0,00	-	1	9.775.040.383	2.371.400.136	2.541.775.617	2.228.488.682	1.901.635.427	9.043.299.862	0,00%	92,51%	0,00	9.043.299.862	0,00%	34,50%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		28.811.466.330	0,00	-	70	9.773.949.859	67	2.371.400.136	67	2.228.488.682	66	1.901.116.227	267	9.042.280.662	100,00%	92,51%	267,00	9.042.280.662	0,00%	31,38%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		32.711.025	0,00	-	2	1.090.524	-	1	500.000	-	1	519.200	2	1.019.200	100,00%	93,46%	2,00	1.019.200	0,00%	3,12%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	515.310.000	0,00	-	1	16.866.450	15.120.000	-	-	-	15.120.000	0,00%	89,65%	0,00	15.120.000	0,00%	9,74%					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		155.310.000	0,00	-	1	16.866.450	1	15.120.000	-	-	1	15.120.000	100,00%	89,65%	1,00	15.120.000	0,00%	9,74%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		207.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		153.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100,00	2.285.519.143	0,00	-	1	460.239.332	143.769.203	124.365.633	43.347.862	131.172.794	442.655.492	0,00%	96,18%	0,00	442.655.492	0,00%	104,87%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		48.952.497	0,00	-	7	6.222.478	3	2.307.632	-	4	3.268.200	7	5.575.832	100,00%	89,61%	7,00	5.575.832	0,00%	11,39%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		699.183.242	0,00	-	33	121.533.002	8	48.579.000	6	20.478.409	3	5.815.000	16	34.800.000	100,00%	90,24%	33,00	109.672.409	0,00%	15,69%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		141.810.083	0,00	-	11	8.695.456	6	4.071.250	-	5	3.033.762	11	7.105.012	100,00%	81,71%	11,00	7.105.012	0,00%	5,01%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		7.500.000	0,00	-	4	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		92.282.608	0,00	-	4	13.916.448	4	1.970.000	-	1.777.000	3.379.500	4	4.558.000	100,00%	83,96%	4,00	11.684.500	0,00%	12,66%			
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		60.000.000	0,00	-	2	15.000.000	-	-	-	-	2	15.000.000	2	15.000.000	100,00%	100,00%	2,00	15.000.000	0,00%	25,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.138.850.000	0,00	-	75	283.750.000	21	77.341.321	23	101.710.224	28	27.851.400	3	76.814.794	75	283.717.739	100,00%	99,99%	75,00	283.717.739	0,00%	24,91%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		96.940.713	0,00	-	1	11.121.948	1	9.500.000	1	400.000	-	-	2	9.900.000	100,00%	89,01%	2,00	9.900.000	0,00%	10,21%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)		395.900.000	0,00	-	1	29.209.321	-	-	25.500.000	-	-	25.500.000	0,00%	87,30%	0,00	25.500.000	0,00%	9,24%				
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		275.900.000	0,00	-	1	29.209.321	-	1	25.500.000	-	-	1	25.500.000	100,00%	87,30%	1,00	25.500.000	0,00%	9,24%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		30.000.000	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		90.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)		3.021.306.000	0,00	-	1	260.521.984	65.253.184	62.642.498	62.324.912	65.004.525	256.225.119	0,00%	97,97%	0,00	256.225.119	0,00%	17,05%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		573.600.000	0,00	-	12	53.500.000	3	13.928.884	3	11.173.412	3	13.334.625	12	49.582.319	100,00%	92,68%	12,00	49.582.319	0,00%	8,64%		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)			0,00		0												0,00%		0,00		0,00%		
				62.000.000																0,00%				0,00%		
			*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)			0,00		0												0,00%		0,00		0,00%		
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)		3.624.330.919	0,00		680	964.377.805			350	679.826.208	330	263.575.220		680	943.401.428	100,00%	97,82%		680,00	943.401.428	0,00%	24,67%	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)		201.500.000	0,00		8	37.944.669	2	9.841.860	2	8.400.000	2	8.400.000	2	10.112.000	8	36.753.860	100,00%	96,86%		8,00	36.753.860	0,00%	18,24%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%				97,79%	
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>IKM Kecamatan (Nilai)</b>	0,00	175.156.348	0,00		88,5	19.365.078		9.453.273		2.945.000				6.445.000		18.843.273	0,00%	97,31%	88,00	18.843.273	0,00%	10,76%	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100,00		0,00		1												0,00%		0,00		0,00%		
				175.156.348				19.365.078		9.453.273		2.945.000				6.445.000		18.843.273		97,31%		18.843.273		66,80%		
			Persentase capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)			0,00		1												0,00%		0,00		0,00%		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)		17.156.348	0,00		30	9.577.568			15	2.945.000			15	6.445.000	30	9.390.000	100,00%	98,04%		30,00	9.390.000	0,00%	54,73%
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		80.000.000	0,00		1	1.556.384	1	1.540.000							1	1.540.000	100,00%	98,95%		1,00	1.540.000	0,00%	1,93%
		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)		78.000.000	0,00		1	8.231.126	1	7.913.273							1	7.913.273	100,00%	96,14%		1,00	7.913.273	0,00%	10,15%
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%				97,31%	
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
								11.710.020.390		<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>									100,00%	93,27%						
																				<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>				